**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 1 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020 )



#

#

# Oleh:

***Herlin Fetriantika***

***17061220***

# PROGRAM STUDI AKUNTANSI

# FAKULTAS EKONOMI

# UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

# YOGYAKARTA

# 2020

**SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Herlin Fetriantika

NIM : 17061220

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kabupaten Sintang (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020)

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademiskepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Yang menyatakan

Herlin Fetriantika

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 1 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

# ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020 )

**ANALYSIS OF THE STATEMENT OF GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAP ) NUMBER 01 ABOUT GOVERMENT FINANCIAL REPORT IN THE SINTANG DISTRICT GOVERNMENT**

**( Case Study on Sintang District Government 2020 )**

**Herlin Fetriantika**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**fetriantika.herl@gmail.com**

# ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan sudah dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansiyang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serata karakteristik-karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyajikan Laporan Keuangan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan Pemerintah, sehingga diharapkan tetap memperhatikan Peraturan-peraturan yang telah diperbaharui agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi setiap pengguna laporan keuangan tersebut.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Penerapan PSAP, Laporan Keuangan

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to determine whether the implementation of The statement of Governmental Accounting Standards number 01 about finance report has been implemented in Sintang District Government. Governmental Accounting Standards (SAP) is the accounting principles that could the applied inpreparing and presenting the financial statements of central government and local government.

This research is a study case that uses financial statements of Sintang Regency of 2019 by using the method of observation and documentation. This study uses a descriptive qualitative research design with the aim of providing a detailed description of the background, traits, as well as the characteristics that are typical of the subject under it.

The results showed that the Sintang District Government has presented accounting financial statements in accordance with The statement of Governmental Accounting Standards number 01 about finance report, so from this case any hope that it would continue to pay attention to the updated the regulations in order to create effective regional financial management and the Financial Statements that are presented can be useful for every user of these financial statements.

**Keywords:** Governmental Accounting Standards (SAP), PSAP Implementation, Financial Statements

# PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkaan peran akuntansi dalam pemerintahan dilingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh, pada organisasi sektor swasta. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi, baik bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, juga informasi bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Kepentingan pengguna laporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai amanat Undang-Undang yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi disemua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintaah pusat maupun pemerintah daerah (BUMD).

Setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah. PSAP No. 1 ini berisikan prinsip-prinsip mengenai Laporan Keuangan. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan dasar- dasar penyajian Laporan Keuangan untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntanbilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk program-program kemakmuran rakyat.

## RUMUSAN MASALAH

Bardasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.01 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sintang 2020) ?”

# LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

## Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut *American Insituteof Certified Public Accounting* (AICPA) menyatakan, bahwa akuntansi adalah sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut *American Acounting Association* (AAA) menyatakan, bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Pengertian Akuntansi menurut Hans Kartikahadi, Dkk. (2016:3) adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi keuangan yang relevan bagi pihak–pihak yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian hasil akhir dalam bentuk laporan keuangan yang mencerminkan keadaaan aktual perusahaan kepada pihak yang berkepentingan.

**Laporan Keuangan Sektor Publik**

Menurut Sujarweni (2015:88) laporan keuangan sektor publik adalah laporan keuangan sektor publik merupakan posisi keuangan penting yang  berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

## Akuntansi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, diperlukan sebuah hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan. Dasar hukum yang digunakan merupakan tolak ukur legalitas formal suatu aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi suatu lembaga, perusahaan maupun dengan para akuntan. Dasar hukum akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 UUD 1945 tentang keuangan
2. Peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dengan *Indische Comptabiliteitswet* atau ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia.

Akuntansi keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat / Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan akuntansinya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

#### Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara pengguna, penyusun, dan auditor. SAP merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan SAP dimaksudkan untuk kebutuhan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO) ̧ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas menuju Akrual

Menurut PP No.71 tahun 2010 : “Basis Akuntansi akrual, yaitu yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catatpada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar”.

Dari pemaparan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi di mana hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Selain itu,basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat

## Akuntansi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini didasari dengan adanya pertimbangan yang tertera dalam:

* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
* UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan APB statement No. 4 (AICPA) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan.

### Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami.

**Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

#### Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

#### Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

#### Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

#### Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

#### Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

* 1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi:
	2. Informasi tentang kebijakan fisikal/keuangan dan ekonomi makro;
	3. Ikhtisiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
	4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
	5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
	6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## Perbedaan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial memiliki persamaan dan perbedaan yang menurut H. Rahmansyah Ritonga (2018) persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah :

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
3. Merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.
4. Menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna ;
5. Menghasilkan laporan keuangan.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat bergunan bagi proses pengambilan keputusan.
7. Memerlukan informasi yang akurat.

# METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO) ̧ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**Kualitatif Deskriptif**

Pada penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dapat berupa studi dokumentasi, dan observasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penggalian data lewat studi dokumentasi menjadi pelengkap proses penelitian kualitatif. Bahkan tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah dipublikasikan, untuk mengamati bagaimana sistematika penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 1.

Teknik yang kedua adalah teknik observasi, observasi adalah kegiatan mengamati secara cermat dan seksama terhadap fakta, data yang mengandung informasi ekonomi yang tergali yang menjadi penyusun objek peristiwa yang diselidiki. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi partisipatif dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, yakni pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

## Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa: “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini adalah metode analisa data deskriptif. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian ini mendeskripsikan apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Pemerintahan Kabupaten Sintang

Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP No. 01

( Penyajian Laporan Keuangan)

Sesuai/tidak sesuai pos-pos dalam setiap jenis laporan keuangan pada PSAP NO. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

*Sumber : Diolah Penulis 2020*

Dari kerangka pikir diatas, sehingga pemikiran peneliti adalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan sudah dilaksanakan Pada Pemerintahan kabupaten Sintang.

# PEMBAHASAN

### Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sintang

LKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Sintang, yang terdiri dari PPKD (BUD), OPD, dan BLUD. LKPD Kabupaten Sintang tahun angggaran 2019 terdiri sebegai berikut:

#### Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Kemudian dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Sintang ini memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, surplus/defisit dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA OPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

Berikut bentuk Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2019 :

##

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.4 Laporan Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi Tahun 2019** | **Realisasi Tahun 2018** |
| **PENDAPATAN – LRA** | **1.971.878.003.157,00** | **1.973.556.931.627,89** | **1.973.959.684.474,27** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA** | **177.924.246.157,00** | **172.275.979.701,89** | **240.581.936.653,27** |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 65.582.000.000,00 | 54.634.160.044,24 | 136.577.723.607,24 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 4.833.984.416,00 | 3.659.180.729,40 | 4.389.872.389,55 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA | 10.500.000.000,00 | 11.016.069.122,00 | 11.810.301.659,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA | 97.008.261.741,00 | 102.966.569.806,25 | 87.804.038.997,48 |
| **PENDAPATAN TRANSFER – LRA** | **1.727.531.157.000,00** | **1.722.509.373.498,00** | **1.669.921.257.821,00** |
| **Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA** | **1.336.343.383.000,00** | **1.313.364.775.071,00** | **1.305.574.639.979,00** |
| Dana Bagi Hasil Pajak – LRA | 33.000.000.000,00 | 28.049.699.930,00 | 34.077.347.168,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam– LRA | 9.000.000.000,00 | 6.552.330.686,00 | 6.886.909.878,00 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA | 933.800.038.000,00 | 930.728.038.000,00 | 909.410.866.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA | 360.543.345.000,00 | 348.034.706.455,00 | 355.199.516.933,00 |
| **Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA** | **338.481.456.000,00** | **338.481.456.000,00** | **294.718.224.000,00** |
| Dana Penyesuaian – LRA | 338.481.456.000,00 | 338.481.456.000,00 | 294.718.224.000,00 |
| **Transfer Pemerintah Provinsi – LRA** | **52.706.318.000,00** | **70.663.142.427,00** | **69.628.393.842,00** |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 50.000.000.000,00 | 67.956.824.427,00 | 69.628.393.842,00 |
| Partisipasi Pihak Ketiga – LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lainnya – LRA | 2.706.318.000,00 | 2.706.318.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LRA** | **66.422.600.000,00** | **78.771.578.428,00** | **63.456.490.000,00** |
| Pendapatan Hibah – LRA | 66.422.600.000,00 | 78.771.578.428,00 | 63.456.490.000,00 |
|  |  |  |  |
| **BELANJA** | **1.741.927.674.977,03** | **1.600.729.086.785,87** | **1.466.942.441.666,44** |
| **BELANJA OPERASI** | **1.328.290.233.186,03** | **1.221.712.033.242,40** | **1.130.135.487.483,40** |
| Belanja Pegawai | 745.526.933.638,80 | 706.238.678.588,20 | 628.613.267.670,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 407.393.031.667,23 | 367.953.194.671,69 | 366.257.606.207,94 |
| Belanja Hibah | 166.421.668.880,00 | 139.415.941.952,51 | 125.985.789.605,46 |
| Belanja Bantuan Sosial | 8.216.965.000,00 | 7.420.016.030,00 | 8.678.788.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 731.634.000,00 | 684.202.000,00 | 600.036.000,00 |
|  |  |  |  |
| **BELANJA MODAL** | **412.622.234.968,00** | **378.604.349.335,47** | **335.980.890.641,04** |
| Belanja Tanah | 3.019.068.130,00 | 1.618.760.020,00 | 5.413.130.900,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 57.169.348.112,00 | 46.808.306.814,36 | 46.328.397.017,29 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 115.506.918.353,00 | 106.472.993.286,11 | 102.031.317.698,89 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 222.346.326.458,00 | 210.810.867.242,00 | 168.395.977.851,45 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 13.089.735.715,00 | 11.801.440.383,00 | 12.723.183.473,41 |
| Belanja Aset Lainnya | 1.490.838.200,00 | 1.091.981.590,00 | 1.088.883.700,00 |
|  |  |  |  |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | **1.015.206.823,00** | **412.704.208,00** | **826.063.542,00** |
| Belanja Tak Terduga | 1.015.206.823,00 | 412.704.208,00 | 826.063.542,00 |
|  |  |  |  |
| **TRANSFER** | **463.127.840.412,00** | **463.802.275.612,00** | **403.371.422.241,54** |
| **TRANSFER BAGI HASIL KE DESA**  | **15.617.006.412,00** | **15.593.041.612,00** | **3.685.494.841,54** |
| Bagi Hasil Pajak | 15.617.006.412,00 | 15.593.041.612,00 | 3.685.494.841,54 |
|  |  |  |  |
| **TRANSFER BANTUAN KEUANGAN** | **447.510.834.000,00** | **448.209.234.000,00** | **399.685.927.400,00** |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 447.510.834.000,00 | 448.209.234.000,00 | 399.585.927.400,00 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL BELANJA + TRANSFER** | **2.205.055.515.389,03** | **2.064.531.362.397,87** | **1.870.313.863.907,98** |
| **SURPLUS (DEFISIT)** | **(233.177.512.232,03)** | **(90.974.430.769,98)** | **103.645.820.566,29** |
|  |  |  |  |
| **PEMBIAYAAN** | **233.177.512.232,03** | **235.814.619.650,49** | **142.081.563.665,74** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **245.727.384.232,03** | **245.963.951.408,49** | **152.478.933.881,74** |
| Penggunaan SiLPA | 245.727.384.232,03 | 245.963.951.408,49 | 152.478.159.881,74 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 |
|  |  |  |  |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **12.549.872.000,00** | **10.149.331.758,00** | **10.397.370.216,00** |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 12.549.872.000,00 | 10.149.331.758,00 | 10.397.370.216,00 |
| Pembentukan Dana Bergulir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0,00** | **144.840.188.880,51** | **245.727.384.232,03** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebihbahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

* Saldo Anggaran Lebih awal;
* Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
* Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
* Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
* Lain-lain;
* Saldo Anggaran Lebih akhir.

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran LebihPemerintah Kabupaten Sintang ini menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

Berikut bentuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun 2019 :

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2019** | **2018** |
| **Saldo Anggaran Lebih Awal** | **245.727.384.232,03** | **152.432.497.881,75** |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 245.963.951.408,49 | 152.432.497.881,75 |
| **Subtotal (1 - 2)** | **(236.567.176,46)** | **0,00** |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 144.840.188.880,51 | 245.681.722.232,04 |
| **Subtotal (3 + 4)** | **144.603.621.704,05** | **245.681.722.232,04** |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 236.567.176,46 | 45.661.999,99 |
| Lain-lain | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)** | **144.840.188.880,51** | **245.727.384.232,03** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Laporan Operasional

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Laporan Operasional bahwa “Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; Beban dari kegiatan operasional; Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; Pos luar biasa, bila ada; Surplus/defisit-LO (Paragraf Standar No. 92 PSAP No. 01 versi Lampiran I.02).”

Kemudian dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sintang ini menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Berikut bentuk Laporan Operasional untuk tahun 2019 :

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN OPERASIONAL**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.6 Laporan Operasional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2019** | **Tahun 2018** |
| **PENDAPATAN – LO** |  |  |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO** |  |  |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO | 51.561.978.538,74 | 142.629.100.920,24 |
| Hasil Retribusi Daerah – LO | 3.672.837.171,66 | 4.408.017.579,10 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | 11.702.168.825,00 | 11.016.069.122,00 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO | 101.439.965.777,93 | 88.078.372.233,35 |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO** | **168.376.950.313,33** | **246.131.559.854,69** |
|  |  |  |
| **PENDAPATAN TRANSFER - LO** |  |  |
| **Transfer Pemerintah Pusat – LO** | **1.314.409.300.071,00** | **1.305.574.639.979,00** |
| Dana Bagi Hasil Pajak – LO | 28.049.699.930,00 | 34.077.347.168,00 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO | 6.552.330.686,00 | 6.886.909.878,00 |
| Dana Alokasi Umum – LO | 931.772.563.000,00 | 909.410.866.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus. – LO | 348.034.706.455,00 | 355.199.516.933,00 |
| **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO** | 0,00 | **0,00** |
| Dana Penyesuaian – LO | 0,00 | 0,00 |
| **Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO** | **68.802.450.786,00** | **65.714.018.782,00** |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi – LO | 66.096.132.786,00 | 65.714.018.782,00 |
| Partisipasi Pihak Ketiga – LO | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lain – LO | 2.706.318.000,00 | 0,00 |
| **Jumlah Pendapatan Transfer – LO** | **1.383.211.750.857,00** | **1.371.288.658.761,00** |
|  |  |  |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO** |  |  |
| Pendapatan Hibah – LO | 106.274.489.952,93 | 84.544.678.470,29 |
| **Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO** | **106.274.489.952,93** | **84.544.678.470,29** |
| **JUMLAH PENDAPATAN – LO** | **1.657.863.191.123,26** | **1.701.964.897.085,98** |
|  |  |  |
| **BEBAN – LO** |  |  |
| **BEBAN OPERASI – LO** |  |  |
| Beban Pegawai | 713.331.019.657,20 | 634.667.056.984,00 |
| Beban Persediaan | 70.599.652.563,66 | 65.831.530.451,73 |
| Beban Jasa | 136.928.833.822,65 | 175.731.306.511,52 |
| Beban Pemeliharaan | 13.803.399.848,00 | 17.616.250.263,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 149.536.468.270,00 | 110.684.546.336,00 |
| Beban Hibah | 140.583.200.582,51 | 124.119.668.717,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 7.452.029.259,00 | 10.182.969.988,00 |
| Beban Bantuan Keuangan | 684.202.000,00 | 600.036.000,00 |
| Beban Transfer | 125.320.819.612,00 | 108.306.299.441,54 |
| Beban Penyusutan | 191.792.809.777,96 | 168.374.248.941,19 |
| Beban Amortisasi | 1.742.019.257,51 | 2.101.923.646,81 |
| Beban Penyisihan Piutang | 237.695.867,15 | 2.311.639.324,40 |
| **Jumlah Beban** | **1.552.012.150.517,64** | **1.420.527.476.605,19** |
| **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** | **105.851.040.605,62** | **281.437.420.480,79** |
| **KEGIATAN NON OPERASIONAL** |  |  |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban | 6.982.000,00 | 183.807.645,00 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | (11.642.970.956,48) | (51.646.541.024,11) |
| **Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional** | **(11.635.988.956,48)** | **(51.462.733.379,11)** |
| **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa** | **94.215.051.649,14** | **229.974.904.699,08** |
|  |  |  |
| **POS LUAR BIASA** |  |  |
| Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| Beban Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| **POS LUAR BIASA** | 0,00 | **0,00** |
| **SURPLUS/DEFISIT LO** | **94.215.051.649,14** | **229.974.687.101,68** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Laporan Perubahan Ekuitas bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

* Ekuitas awal
* Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
* Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
* Ekuitas akhir

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sintang ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Berikut bentuk Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2019

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.7 Laporan Perubahan Ekuitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2019** | **2018** |
| **EKUITAS AWAL** | **4.024.498.088.623,91** | **3.783.540.395.528,60** |
| **Surplus/Defisit – LO** | **94.215.051.649,14** | **229.974.687.101,68** |
| **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar** | **35.301.805.193,26** | **10.983.005.993,63** |
| - Penyesuaian Piutang | 1.746.026.726,00 | 11.225.749.826,68 |
| - Penyesuaian Persediaan | 13.784.100,00 | 295.480.495,00 |
| - Penyesuaian Aset Tetap | 33.616.190.500,00 | 573.619.000,00 |
| - Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap | 0,00 | (915.540.990,68) |
| - Penyesuaian Amortisasi | 0,00 | 195.746.450,57 |
| - Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 240.990.864,07 |
| - Penyesuaian Pengakuan Hutang | (214.360.068,22) | (660.374.792,00) |
| - Penyesuaian Aset Lainnya | (92.020.115,00) | 27.623.140,00 |
| - Lain-lain | 232.184.050,48 | (288.000,01) |
| **EKUITAS AKHIR** | **4.154.014.945.466,31** | **4.024.498.088.623,91** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Neraca

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Neraca bahwa unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Oleh karena itu, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

* Kas dan setara kas;
* Investasi jangka pendek;
* Piutang pajak dan bukan pajak;
* Persediaan;
* Investasi jangka panjang;
* Aset tetap;
* Kewajiban jangka pendek;
* Kewajiban jangka panjang;
* Ekuitas

Kemudian dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Sintang ini memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca OPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Namun untuk Neraca ada beberapa bagian yang tidak ada disajikan yaitu investasi jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Hal ini terjadi karena unsur tersebut memang tidak ada di Pemerintah Kabupaten Sintang.

Berikut bentuk Neraca untuk tahun 2019:

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## NERACA

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.8 Neraca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **2019** | **2018** |
| **ASET** |  |  |
| **ASET LANCAR** |  |  |
| Kas di Kas Daerah | 116.759.133.104,58 | 231.517.741.695,64 |
| Kas di Kas BLUD | 9.902.283.494,78 | 8.213.266.826,53 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 318.492.008,00 | 369.930.776,78 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 4.420.000,00 |
| Kas di Kas Lainnya | 18.023.955.526,64 | 6.202.841.196,06 |
| Beban Dibayar Dimuka | 3.096.788.259,67 | 464.948.049,98 |
| Piutang Pajak | 8.978.787.943,60 | 13.285.903.561,60 |
| Penyisihan Piutang Pajak | (5.864.644.158,70) | (6.343.619.947,80) |
| Piutang Pajak Netto | 3.114.143.784,90 | 6.942.283.613,80 |
| Piutang Retribusi | 12.676.026,00 | 28.092.918,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | (11.103.155,25) | (10.752.085,00) |
| Piutang Retribusi Netto | 1.572.870,75 | 17.340.833,00 |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | 712.775.099,04 | 730.388.646,23 |
| Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | (303.464.000,00) | (308.999.000,00) |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranNetto | 409.311.099,04 | 421.389.646,23 |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 421.383.021,00 | 474.283.021,00 |
| Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | (421.383.021,00) | (382.208.021,00) |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto | 0,00 | 92.075.000,00 |
| Piutang Lainnya | 36.123.722.854,63 | 35.988.143.669,20 |
| Penyisihan Piutang Lainnya | (3.619.743.985,00) | (3.606.411.051,25) |
| Piutang Lainnya Netto | 32.503.978.869,63 | 32.381.732.617,95 |
| Persediaan | 14.750.536.055,14 | 13.974.705.233,10 |
| **Jumlah Aset Lancar** | **198.880.195.073,13** | **300.602.675.489,07** |
|  |  |  |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** |  |  |
| Investasi Non Permanen |  |  |
| Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| **Jumlah Investasi Non Permanen** | **300.000.000**,00 | **300.000.000,00** |
| Investasi Permanen |  |  |
| Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar | 86.275.105.600,00 | 80.275.105.600,00 |
| Penyertaan Modal pada PDAM | 41.636.381.647,84 | 40.518.379.219,52 |
| Penyertaan Modal pada PT Jamkrida | 2.625.000.000,00 | 2.625.000.000,00 |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **130.536.487.247,84** | **123.418.484.819,52** |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **130.836.487.247,84** | **123.718.484.819,52** |
|  |  |  |
| **ASET TETAP** |  |  |
| Tanah | 1.392.856.638.450,93 | 1.357.081.612.125,72 |
| Peralatan dan Mesin | 530.635.886.427,87 | 430.297.790.914,25 |
| Gedung dan Bangunan | 1.352.209.700.912,93 | 1.235.243.269.896,51 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1.871.425.141.192,42 | 1.660.154.919.051,42 |
| Aset Tetap Lainnya | 73.228.614.388,67 | 61.313.149.535,67 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 85.780.628.685,40 | 97.175.058.716,41 |
| Akumulasi Penyusutan | (1.457.415.578.374,70) | (1.223.987.613.224,05) |
| **Jumlah Aset Tetap** | **3.848.721.031.683,52** | **3.617.278.187.015,93** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASET LAINNYA** |  |  |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 3.191.043.022,50 | 3.564.141.763,77 |
| Aset Tak Berwujud | 15.362.309.462,11 | 14.270.327.872,11 |
| Amortisasi Aset Tak Berwujud | (12.229.113.658,77) | (10.487.094.401,26) |
| Aset Tak Berwujud Netto | 3.133.195.803,34 | 3.783.233.470,85 |
| Aset Lain-Lain | 3.304.853.022,05 | 3.171.868.108,50 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (1.571.067.328,03) | (1.053.031.327,53) |
| Aset Lain-Lain Netto | 1.733.785.694,02 | 2.118.836.780,97 |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **8.058.024.519,86** | **9.466.212.015,59** |
| **JUMLAH ASET** | **4.186.495.738.524,35** | **4.051.065.559.340,11** |
|  |  |  |
| **KEWAJIBAN** |  |  |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** |  |  |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 163.675.253,49 | 580.816.262,98 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 16.765.977,00 | 57.118.094,22 |
| Utang Belanja | 32.084.696.328,55 | 25.586.585.430,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 215.655.499,00 | 342.950.929,00 |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **32.480.793.058,04** | **26.567.470.716,20** |
| **Jumlah Kewajiban** | **32.480.793.058,04** | **26.567.470.716,20** |
|  |  |  |
| **EKUITAS** | **4.154.014.945.466,31** | **4.024.498.088.623,91** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **4.186.495.738.524,35** | **4.051.065.559.340,11** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Laporan Arus Kas

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Laporan Arus Kas bahwa Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Oleh karena itu, Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan SP2D yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2019. Laporan Arus Kas ini menyajikan informasi mengenai informasi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara.

Berikut bentuk Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2019

##

## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

Tabel IV.9 Laporan Arus Kas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Tahun 2019** | **Tahun 2018** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** |  |  |
| **ARUS KAS MASUK** |  |  |
| Penerimaan Pajak Daerah | 54.634.160.044,24 | 136.577.723.607,24 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 3.659.180.729,40 | 4.389.872.389,55 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.016.069.122,00 | 11.810.301.659,00 |
| Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 102.559.973.165,79 | 87.177.442.022,48 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 28.049.699.930,00 | 34.077.347.168,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 6.552.330.686,00 | 6.886.909.878,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 930.728.038.000,00 | 909.410.866.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 348.034.706.455,00 | 355.199.516.933,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | 338.481.456.000,00 | 294.718.224.000,00 |
| Penerimaan Hibah | 78.771.578.428,00 | 63.456.490.000,00 |
| Penerimaan Lainnya | 70.663.142.427,00 | 69.628.393.842,00 |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk** | **1.973.150.334.987,43** | **1.973.333.087.499,27** |
| **ARUS KAS KELUAR** |  |  |
| Pembayaran Pegawai | 706.238.678.588,20 | 628.613.267.670,00 |
| Pembayaran Barang dan jasa | 447.286.496.654,20 | 426.906.375.813,40 |
| Pembayaran Hibah | 62.782.156.000,00 | 65.337.020.000,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | 4.720.500.000,00 | 8.678.788.000,00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | 684.202.000,00 | 600.036.000,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 412.704.208,00 | 826.063.542,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 15.593.041.612,00 | 3.685.494.841,54 |
| Pembayaran Transfer Dana Desa | 448.209.234.000,00 | 399.685.927.400,00 |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar** | **1.685.927.013.062,40** | **1.534.332.973.266,94** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **287.223.321.925,03** | **439.000.114.232,33** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** |  |  |
| **ARUS KAS MASUK** |  |  |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 21.835.000,00 | 214.194.000,00 |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 384.761.640,46 | 412.402.975,00 |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | 0,00 | 774.000,00 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk** | **406.596.640,46** | **627.370.975,00** |
| **ARUS KAS KELUAR** |  |  |
| Perolehan atas Tanah | 1.618.760.020,00 | 5.413.130.900,00 |
| Perolehan atas Peralatan dan Mesin | 46.808.306.814,36 | 46.328.397.017,29 |
| Perolehan atas Gedung dan Bangunan | 106.472.993.286,11 | 102.031.317.698,89 |
| Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 210.810.867.242,00 | 168.395.977.851,45 |
| Perolehan atas Aset Tetap Lainnya | 11.801.440.383,00 | 12.723.183.473,41 |
| Perolehan atas Aset Lainnya | 1.091.981.590,00 | 1.088.883.700,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 10.149.331.758,00 | 10.397.370.216,00 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar** | **388.753.681.093,47** | **346.378.260.857,04** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi** | **(388.347.084.453,01)** | **(345.750.889.882,04)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN** |  |  |
| **ARUS KAS MASUK** |  |  |
| Penerimaan perhitungan pihak ketiga | 104.664.765.697,99 | 100.682.788.351,93 |
| Koreksi Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya | 246.671.745,68 | 0,00 |
| Penerimaan Non Anggaran | 61.242,37 | 937.548.664,37 |
| **Jumlah Arus Kas Masuk** | **104.911.498.686,04** | **101.620.337.016,30** |
| **ARUS KAS KELUAR** |  |  |
| Pengeluaran perhitungan pihak ketiga | 104.665.129.333,99 | 100.682.827.525,93 |
| Pengeluaran Non Anggaran | 426.943.185,08 | 490.146.529,59 |
| **Jumlah Arus Kas Keluar** | **105.092.072.519,07** | **101.172.974.055,52** |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitori/Non Anggaran** | **(180.573.833,03)** | **447.362.960,78** |
| **Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode** | **(101.304.336.361,01)** | **93.696.587.311,07** |
| **Saldo Awal Kas di BUD/BLUD/FKTP** | **246.308.200.495,01** | **152.611.613.183,94** |
| **Saldo Akhir Kas di BUD/BLUD/FKTP/Kas di Bendahara** | **145.003.864.134,00** | **246.308.200.495,01** |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang*

#### Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah menurut PSAP No.01 versi Lampiran I.02 tentang Catatan atas Laporan Keuangan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau daftar rincian atau analisis dari angka/nilai suatu pos yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

* Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
* Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
* Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
* Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
* Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
* Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
* Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Kemudian dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten SIntang menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten SintangTahun Anggaran 2019disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan OPD, Laporan BLUD dengan Laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan PPKDterdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel IV.10 Analisis Penulis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Laporan Keuangan** | **Menurut PSAP No. 01 Lampiran I.02** | **Penerapannya Di****Pemerintah Kabupaten Sintang** |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran | LRA menyajikan sekurang-kurangnyaunsur-unsur sbb:* Pendapatan
* Belanja
* Transfer
* surplus/defisit
* pembiayaan
* sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
 | Pos-pos yang di sajikan:* pendapatan
* belanja
* transfer
* surplus/defisit
* pembiayaan
* sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
 |
| 2 | Neraca | Neraca mencantumkan pos-pos berikut:* kas dan setara kas
* investasi jangka pendek
* piutang pajak dan bukan pajak
* persediaan
* investasi jangka panjang
* aset tetap
* kewajiban jangka pendek
* kewajiban jangka panjang
* ekuitas dana
 | Pos-pos yang disajikan:* kas
* piutang pajak dan bukan pajak
* persediaan
* investasi jangka panjang
* aset tetap
* kewajiban jangka pendek
* ekuitas dana
 |
| 3 | Laporan Operasional | LO menyajikan pos-pos sbb:* pendapatan dari kegiatan operasional
* beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi
* surflus atau deficit
 | Pos-pos yang disajikan:* pendapatan dari kegiatan operasional
* beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi
* surflus atau deficit
 |
| 4 | Laporan Arus Kas | Laporan Arus Kas menyajikan informasiMengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. | Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.  |
| 5 | Laporan Perubahan Ekuitas | Menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos sbb:* ekuitas awal
* surplus/defisit-LO
* koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
* ekuitas akhir
 | Pos-pos yang disajikan:* ekuitas awal
* surplus/defisit-LO
* koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
* ekuitas akhir
 |
| 6 | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan:* saldo anggaran lebih awal
* informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
* Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
* saldo anggaran lebih akhir
 | Pos-pos yang disajikan:* saldo anggaran lebih awal
* informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
* Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
* saldo anggaran lebih akhir
 |
| 7 | Catatan atas Laporan Keuangan | CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLk | CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLk |

*Sumber: Data di olah oleh peneliti, 2020*

**KESIMPULAN**

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh dari Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, bahwasanya penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai persyaratan kelengkapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan SAL
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Neraca
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Namun untuk Neraca ada beberapa bagian yang tidak ada disajikan yaitu investasi jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Hal ini terjadi karena unsur tersebut memang tidak ada di Pemerintah Kabupaten Sintang. Selebihnya untuk unsur-unsur bagian laporan keuangan yang lain sudah tersajikan dengan lengkap.

##

## SARAN

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah:

* 1. Untuk Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kabupaten Sintang tetap menggunakan teknik komputerisasi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dan mengembangkan sistem komputer tersebut dengan tetap memperhatikan Peraturan-peraturan yang telah diperbaharui agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi setiap pengguna laporan keuangan tersebut.
	2. Hendaknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang mempertahankan kinerja yang telah diraih atau bahkan terus ditingkatkan lagi supaya terus tercipta tata kelola dengan baik terutama dalam penyajian laporan keuangan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan agar dalam pemeriksaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.

Hafsah, M. D., & Diana, M. (2017). Analisis Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, *8*(8).

Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi pemerintahan. *Bogor: In Media*.

Husein, F. (2015) *Akuntansi Pemerintahan: Konsep Dan Praktik.* Bandung

Kartopawiro , Sardio. dan Susanto , Yohanes. *Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.* Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.16(1), 2018

Kumaat, A. K., Morasa, J., & Kalalo, M. Y. (2015). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, *4*(2), 14-27.

Nordiawan, D., Iswahyudi, S. P., dan Maulidah, R. *Akuntansi Pemerintahan.* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 24

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). Dasar-Dasar Statstk Penelitan. Yogyakarta: Sibuku Media

Pemerintah Kabupaten Sintang. (2019). RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rahmat Sahid, *Sangit26.blogspot.co.id*. Diakses pada tanggal 30 November 2017

S.H, Arman. (2018). Laporan Keuangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. LAP-92/PW14/1/2018. Pontianak.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). E-Book Akuntansi Sektor Publik. *KARTI*.

Yuswar Effendy, dkk Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, (Medan: Perdana Publishing. 2015), h. 189